

DARTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
2. KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1. Kaum Intelektual dan Politik Aliran.....	15
2.1.1. Siapa Kaum Intelektual.....	15
2.1.2. Politik Aliran.....	23
2.2. Makna Partai Politik Bagi Kaum Intelektual.....	37
2.3. Pendekatan-pendekatan Perilaku Memilih.....	42
2.4. Hubungan Kaum Intelektual dan Partai Politik.....	47
3. METODE PENELITIAN.....	55
3.1. Sifat Penelitian Ini.....	55
3.2. Penentuan Lokasi dan Subyek Penelitian.....	59
3.3. Pemilihan Subyek Penelitian.....	62
3.4. Teknik Pengumpulan Materi Empiris.....	64
3.5. Teknik Analisis Materi Empiris.....	73
4. GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN.....	77
4.1. Sejarah STIP Surabaya.....	77
4.2. Perkembangan STIP Surabaya.....	84
4.3. Orang PSI Jadi Rektor.....	90
4.5. Perkembangan Fakultas Kesejahteraan Sosial.....	93
5. KELOMPOK ABANG, KELOMPOK IJO, DAN KELOMPOK DOSEN MUDA.....	95
5.1. Kelompok Abang.....	98
5.2. Kelompok Ijo.....	105
5.3. Kelompok Dosen Muda.....	109

6. PERTARUNGAN KELOMPOK ABANG, KELOMPOK IJO, DAN KELOMPOK DOSEN MUDA.....	115
6.1. Kelompok Penguasa: Penguasa di atas Penguasa.....	119
6.2. Ketua Jurusan: Jabatan Yang Diperebutkan.....	127
6.3. Pemilihan Anggota Senat Fakultas: Balances of Power.....	137
6.4. Kelompok Ijo Terjebak Permainan Dosen Muda.....	144
6.5. Ali Huda: Guru Besar Yang "Wurung".....	151
6.6. Pertarungan Di Luar Ring.....	158
7. PERILAKU POLITIK KAUM INTELEKTUAL.....	166
7.1. Golkar Sebagai Patron dalam Perebutan Pengaruh.....	166
7.2. Pemilu 1999: Pertobatan Golkar "Gadungan".....	178
7.2.1. Kelompok Abang Pulang Kandang.....	183
7.2.2. Kelompok Ijo Menolak Partai Islam.....	191
7.2.3. Kelompok Dosen Muda: Tidak Pernah Memilih Golkar.....	202
8. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS.....	220
8.1. Terbentuknya Kelompok Afinitas Politik Aliran.....	220
8.2. Hubungan Antar-kelompok Afinitas Politik Aliran.....	228
8.3. Pilihan-pilihan Politik Kaum Intelektual.....	235
DAFTAR PUSTAKA.....	250

DAFTAR BAGAN

3.1. Proses Penelitian.....	75
5.2. Varian Subyek Penelitian.....	97
8.3. Karakteristik Kelompok.....	227
8.4. Skema Tindakan Kelompok Abang.....	246
8.5. Skema Tindakan Kelompok Ijo.....	248
8.6. Skema Tindakan Kelompok Dosen Muda.....	250

RINGKASAN

Politik aliran yang menjadi karakteristik utama kepolitikan Orde Lama (Orla), pada masa pemerintahan Orde Baru telah direduksi melalui berbagai kebijakan seperti depolitisasi, deparpolisasi, *floating mass*, pengasas-tunggalan Pancasila, dan lainnya. Namun, itu hanya terjadi pada level makro. Pada level mikro politik aliran masih tumbuh subur. Paling tidak hal itu terjadi di STIP Surabaya, yang menjadi lokasi penelitian ini. Tenaga pengajar sebagai intelektual terpolarisasi ke dalam kutub-kutub agama, ideologis, dan kepentingan. Munculnya kelompok "abang," kelompok "ijo," dan kelompok dosen muda, dan konflik-konflik di antara mereka di perguruan tinggi itu menunjukkan menunjukkan masih suburnya politik aliran pada level mikro. Kategorisasi ini tidak identik dengan kategorisasi Clifford Geertz *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Kategorisasi kelompok "abang," kelompok "ijo," dan kelompok dosen muda tidak sertamerta didasarkan pada aliran, melainkan juga berakar pada "kelangkaan posisi dan sumber daya." Karena itu pula konflik-konflik di antara kelompok-kelompok itu tidak hanya bersumber dari perbedaan agama dan ideologi, juga bersumber pada "kelangkaan posisi dan sumber daya."

Fenomena tersebut mengalami rejuvenasi ketika Soeharto jatuh dan pemerintahan B.J. Habibie memberikan kebebasan kepada organisasi sosial dan organisasi politik untuk menggunakan asas selain Pancasila. Seperti pada masa pasca-kemerdekaan, di masyarakat terjadi pembilahan sosial berdasarkan agama, etnisitas, kedacrahan, ideologi, dan lainnya. Pada level mikro di STIP Surabaya, tenaga pengajar sebagai intelektual yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai pencari dan pembela kebenaran serta mengembangkan ilmu pengetahuan, ternyata terjebak dalam konflik-konflik yang dalam banyak hal berakar ke politik aliran. Konflik antara kelompok "abang" dengan kelompok "ijo" di tingkat mikro, misalnya, sulit dilepaskan dari "tradisi" konflik antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam di tingkat makro. Sulit diidentifikasi sumber-sumber konflik di antara mereka, antara ideologi dan "kelangkaan posisi dan sumber daya" (kepentingan) saling tumpang tindih. Namun, sulit dibantah bahwa konflik antara kelompok "abang" dan kelompok "ijo" merupakan refleksi dari tradisi konflik yang melibatkan kelompok nasionalis di satu pihak, dan kelompok Islam di lain pihak. Kerana terjadi di level lokal, konflik antara dua kelompok itu tidak bersifat *centrifugal*. Persoalan yang dikonflikkan tidak sampai menyentuh sistem pemerintahan dan bentuk negara.

Dalam melihat negara, kelompok "abang" memposisikan diri menjadi bagian dari struktur dan mereka juga mereproduksi diskursus-diskursus resmi negara. Struktur dilihatnya tidak bersifat *constraining*, melainkan memberikan *enabling* untuk menjalin akses ke kekuasaan lokal dan suprastruktur. Mereka dapat memaksimalkan keuntungan, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Tidak demikian dengan kelompok "ijo" dan kelompok dosen muda. Dua kelompok ini tidak memposisikan diri menjadi bagian dari struktur karena tidak mempunyai akses

ke sana, dan tidak sertamerta mereproduksi diskursus-diskursus resmi negara. Karena itu, mereka tidak dapat memaksimumkan keuntungan politik dan ekonomi. Kedua kelompok ini membangun basis legitimasi, seperti diteorikan Jurgen Habermas, melalui ilmu pengetahuan.

Dalam kepolitikan, sikap dan tindakan kelompok intelektual tidaklah tunggal. Selama pemerintahan Orba kelompok "abang" menempatkan Golkar sebagai patron dan memposisikan partai politik (PPP dan PDI) sebagai "hantu." Hubungan kelompok "abang" dan Golkar mengarah pada pola hubungan *patronage* atau bersifat *clientilistic*. James C. Scott menggambarkan sebagai hubungan *patron-client*. Dalam pandangan mereka, negara harus membayar mahal jika partai politik yang menang dalam Pemilu. Bentuk negara kesatuan dan ideologi Pancasila akan diganti dengan bentuk dan ideologi negara yang lain. Diskursus semacam ini merupakan replika dari diskursus resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Orba. Temuan ini berbeda dengan temuan Daniel T. Sparringa yang menunjukkan bahwa reproduksi diskursus resmi seperti itu lebih banyak dilakukan oleh kalangan teknokrat dan konsultan pemerintah (Intelektual Ortodoks). Sementara itu, di kalangan kelompok "ijo" sikap dan tindakan politiknya lebih beragam. Sebagian menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar, sebagian lainnya ke PPP. Kurang harmonisnya hubungan pemerintah dengan kelompok Islam di tingkat makro sejak awal Orba hingga pertengahan 1980-an menyebabkan anggota kelompok ini gagal menjalin akses ke pusat-pusat kekuasaan. Meskipun setiap Pemilu memilih Golkar, tetap saja mereka dicurigai kurang atau tidak loyal kepada Golkar. Di kelompok dosen muda sikap dan tindakan politiknya lebih merupakan penolakan (*resistance*) terhadap kepolitikan negara yang ada. Penolakan itu mereka tunjukkan dengan tidak pernah menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. PDI dan "golongan putih" menjadi pilihan politiknya setiap kali Pemilu.

Setelah Soeharto jatuh dan PNS mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya, sikap dan tindakan politik kelompok intelektual menunjukkan revitalisasi atau rejuvenasi politik aliran. Paling tidak dalam tingkat diskursus, kelompok intelektual memilih partai politik yang mempunyai kedekatan ideologis. Kelompok "abang," meskipun tidak lagi menempatkan Golkar sebagai patron, memilih partai politik yang menggunakan asas Pancasila dan tetap mengawatirkan partai politik yang menggunakan Islam sebagai asasnya. Mereka yang mengklaim diri sebagai orang-orang nasionalis menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai-partai politik bercorak nasionalis, seperti PDI Perjuangan. Proses ini yang disebut dengan kelompok abang pulang kandang. Yang terjadi di kelompok "ijo," pemahaman mereka terhadap format politik yang ada cenderung rasionalistik, realistik, dan substantivistik, atau akomodasionis dan substansialis. Dalam hal memilih partai politik, misalnya, kelompok ini tidak mementingkan Islam sebagai simbol, namun lebih mementingkan penggunaan substansi ajaran Islam untuk kesejahteraan umat Islam. Karena itu, kelompok ini menolak partai politik yang menggunakan Islam sebagai asas, karena partai semacam ini akan eksklusif dan justru membatasi perjuangan umat Islam. Mereka menerima bentuk negara yang

sudah ada dan menempatkannya sebagai negara damai, bukan negara Islam tetapi tidak menentang Islam. Meskipun demikian, mereka tetap menjatuhkan pilihan poilitiknya kepada partai politik berbasis massa Islam, yaitu PKB dan PAN. Pilihan politik terhadap PKB dan PAN ini merefleksikan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang bersifat rasional dan kontekstual. Dalam pemahaman mereka dalam Islam dikenal pembagian urusan yang duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam antara yang Islam dan non-Islam boleh bekerjasama, namun dalam urusan-urusan duniawi. Kelompok dosen muda dalam menentukan pilihan politiknya lebih didasarkan kepada program kerja dan tokoh partai politik. Visi perubahan yang mereka kembangkan di perguruan tinggi sangat mewarnai pertimbangan-pertimbangan tersebut. PDI Perjuangan mereka simbolkan sebagai partai politik yang banyak menawarkan perubahan-perubahan. Karena itu, mereka menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai politik ini.